

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
I.1. Dasar Hukum.....	3
I.2. Maksud dan Tujuan	4
I.3. Lokasi dan Waktu	4
I.4. Agenda Kunjungan	4
II. HASIL KUNJUNGAN KERJA	5
II.1. Hasil Peninjauan	5
II.2. Kesimpulan dan Rekomendasi	9
III. PENUTUP	10
IV. LAMPIRAN	11
Foto Kegiatan	11



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI
DALAM RANGKA PERSIAPAN INFRASTRUKTUR DAN
TRANSPORTASI ANGKUTAN LEBARAN
KE PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 14-18 APRIL 2023

=====

I. PENDAHULUAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Propinsi Jawa Barat difokuskan pada pengawasan persiapan angkutan Mudik Lebaran tahun 2023, utamanya kesiapan penyelenggaraan angkutan di sektor darat, kereta api, dan sektor Jalan, di mana Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan dan lintasan utama arus mudik Lebaran 2023.

Komisi V DPR RI melakukan peninjauan Posko Lebaran 2023 di Terminal Type A Leuwipanjang Bandung, peninjauan Stasiun Kereta Api Bandung, dan Pertemuan Komisi V DPR RI dengan Mitra Kerja, yang dihadiri oleh PT KAI dan PT Jasa Marga dalam rangka persiapan sarana dan fasilitas angkutan Lebaran 2023.

Selanjutnya, potensi perjalanan Lebaran 2023 naik signifikan dibandingkan Lebaran 2022. Berdasarkan hasil survey Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, potensi pergerakan nasional pada masa lebaran 2023 adalah 45,8% atau 123,8 juta orang dengan potensi pergerakan asal perjalanan terbanyak adalah di Pulau Jawa sebanyak 62,5% atau 77,3 juta orang, dan prediksi menuju Propinsi Jawa Barat sebanyak Jawa Barat 16,73% (20,72 juta orang). Oleh karena itu, perluantisipasi dan kesiapan Pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2023 demi mendukung aspek keselamatan, keamanan, kelancaran dan pelayanan prima.

I.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23.
2. Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

- Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 4. Rapat Internal Komisi V DPR RI Tanggal 14 Maret 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Kunjungan Kerja adalah untuk mengetahui secara langsung serta menggali informasi terkait permasalahan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Provinsi Jawa Barat, khususnya yang berkaitan dengan persiapan arus mudik lebaran Tahun 2023.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya Kunjungan Kerja adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi dan Tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu:

butir a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;

butir d. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:

butir f. mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023 dalam rangka Persiapan Arus Mudik Lebaran di Provinsi Jawa Barat pada Tanggal 14-18 April 2023 yang dipimpin langsung oleh **H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI (A – 130 / F-P GERINDRA / DAPIL SULSEL).**

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Barat yaitu melakukan peninjauan Terminal Leuwipanjang, Peninjauan Stasiun Kereta Api Bandung dan sekaligus melakukan pertemuan dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI (Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan, BMKG dan Basarnas), serta *stakeholder* terkait lainnya yaitu PT Jasa Marga dan PT Kereta Api Indonesia.

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

II.1. Hasil Temuan Peninjauan dan Pertemuan terkait Persiapan Angkutan Lebaran 2023

1. Peninjauan Terminal Leuwipanjang Bersama Ditjen Perhubungan Darat

- a) Terminal Leuwipanjang memiliki peran besar dalam menata lalu lintas dan pemungutan retribusi sebagai pengendali kendaraan umum di Bandung. Oleh karena itu, sangat perlu peningkatan pengawasan oleh Pemerintah, khususnya Ditjen Perhubungan Darat terhadap kendaraan angkutan penumpang yang masuk ke terminal, terutama terkait Uji KIR, yang meliputi uji emisi gas buang, uji lampu, uji kedalaman alur ban, uji rem, uji speedometer, dan uji kebisingan.
- b) Perlu adanya sterilisasi angkutan diluar terminal (angkutan yang parkir di pinggir jalan) dan konektivitas penumpang dari terminal. Oleh karena itu, perlu koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung terkait angkutan di luar terminal yang berhenti dipinggir jalan agar tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan.
- c) Perlu pengawasan secara ketat terhadap kondisi kendaraan umum dan truk ODOL sehingga tidak merugikan masyarakat. Selain itu dalam realitas keseharian aspek *safety* sering kalah oleh aspek aksesibilitas dan mobilitas, yang penting penumpangnya terangkut, keselamatan dinomorduakan.
- d) Penataan dan peningkatan kebersihan Terminal Leuwipanjang, termasuk genangan air yang ada di area parkir bus.
- e) Digitalisasi pelayanan dan penjualan tiket bus untuk mengatasi penumpukan penumpang, serta pengawasan terhadap ketepatan waktu keberangkatan angkutan yang akan membawa penumpang.
- f) Koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah sebagai regulator dan para operator transportasi dan penumpang sebagai pengguna jasa, sehingga penyelenggaraan pelayanan angkutan Lebaran 2023 dapat diselenggarakan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.

2. Peninjauan Stasiun Kereta Api Bandung Bersama Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI

- a) Jika dibandingkan dengan realisasi volume penumpang tahun sebelumnya, secara keseluruhan untuk 2023 prediksi penumpang mencapai 6,24 juta penumpang dan mengalami penurunan sebesar 10% dibandingkan tahun 2019 dan meningkat sekitar 22,7% dari tahun 2022. Untuk kereta api antar kota,

perkiraan untuk jumlah penumpang sekitar 3,48 juta penumpang, KA perkotaan regional sekitar 2,76 juta penumpang untuk angkutan perkotaan, KA perkotaan commuter prediksi 15,79 juta pada masa angkutan lebaran tahun 2023.

- b) Total kapasitas angkut sebanyak 1.618.946 penumpang di Daop 2 Bandung dan kapasitas angkut hariannya sekitar 73.627 penumpang.
- c) Ditjen Perkeretaapian dan PT. KAI perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan, termasuk membuat rencana operasi atau scenario antisipasi untuk menghindari adanya penumpukan penumpang pada masa Lebaran, termasuk menerapkan sistem pelayanan digitalisasi di stasiun dan pemesanan tiket online. Selain itu, untuk DJKA perlu melakukan *rampcheck* sarana, SPM di stasiun dan dalam perjalanan KA, monitoring daerah rawan, serta inspeksi keselamatan, termasuk ketepatan waktu perjalanan KA.
- d) Perlu dilakukan evaluasi kembali terkait persyaratan melakukan perjalanan menggunakan kereta api yaitu harus sudah melakukan vaksin dan aplikasi satu sehat. Hal ini penting agar tidak menyulitkan penumpang, tetapi di sisi lain kesehatan masyarakat tetap terjamin.
- e) Untuk pengoptimalan, DJKA bersama dengan operator perlu melaksanakan posko pengawasan terpadu, penambahan perjalanan KA dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, mengoptimalkan sarana Siap Operasi yang tersedia, antisipasi gangguan sarana dan prasarana dengan menempatkan lokomotif posko, kereta pembangkit, *crane* serta penempatan Alat Material Untuk Siaga pada lokasi yang ditentukan, termasuk pengawasan perlintasan sebidang.
- f) Pada posko angkutan mudik lebaran oleh Dirjen KA memastikan semua petugas posko mengupdate secara berkala laporan penanganan gangguan operasional kepada Ketua Posko Balai dan Posko Pusat setiap 6 jam.
- g) Perlu skema mitigasi dan pemantauan khusus pada tanah labil/amblesan, daerah longsor, dan banjir.
- h) Terkait angkutan barang, agar dioptimalkan perjalanan angkutan KA barang pada malam hari sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan. Oleh karena itu, PT. KAI perlu melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan faktor persaingan bisnis dengan moda lainnya. *On time performance* dari PT. KAI sudah mencapai 99% dan akan terus dijaga kualitasnya.

- i) PT. KAI perlu terus melakukan peremajaan sarana perkeretaapian, khususnya terkait fasilitas kursi kereta api ekonomi yang masih berbentuk 90° dan masih menggunakan bahan yang kurang nyaman bagi penumpang.

3. Ditjen Bina Marga dan BPJT Kementerian PUPR

- a) Pada angkutan Lebaran 2023, ruas Jalan Nasional di pulau Jawa yang siap digunakan sepanjang 4.858 km terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.229 km (mantap 92%), Lintas Tengah Jawa 1.197 km (mantap 95%), Lintas Selatan Jawa 888 km (mantap 97%), dan Pantai Selatan Jawa 1.543 km (mantap 93%). Sedangkan Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 km dilengkapi fasilitas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) sebanyak 90 TIP (57 TIP A, 31 TIP B dan 2 TIP C).
- b) Kesiapan infrastruktur jalan Tol untuk mendukung penyelenggaraan mudik Lebaran 2023 provinsi Jawa Barat yaitu dengan beberapa upaya diantaranya:
 - 1. Rencana jalan Tol fungsional Angkutan Lebaran 2023 total 11 ruas sepanjang 222 km yaitu di pulau Jawa 7 ruas sepanjang 94,5 km dan pulau Sumatera 4 ruas sepanjang 127,5 km.
 - 2. Khusus provinsi Jawa Barat sebanyak 5 ruas tol fungsional yaitu Cimalaka - Dawuan, Sadang - Sukabungah, Tarumajaya - Cilincing, Cigombong - Cibadak, dan Jatikarya - Cikeas.
 - 3. Memastikan kondisi Jalan Tol dalam keadaan baik dan melakukan preservasi jalan sebelum libur lebaran 2023.
 - 4. Ditjen Bina Marga perlu melakukan identifikasi dan perbaikan dengan pengaturan *traffic flow*, tambahan tempat parkir, mobile toilet, Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik, informasi ketersediaan tempat parkir dengan sistem RAMS sehingga tidak menimbulkan antrian sampai dengan jalan tol.
- c) Perlu peningkatan pelayanan dengan penambahan tempat untuk beristirahat, peningkatan transaksi di gerbang Tol dengan penambahan personil sehingga tidak menimbulkan antrian pada gerbang Tol, layanan lalu lintas jalan Tol dengan penempatan personil keamanan dan CCTV, perbaikan konstruksi jalan yang berlubang, pelebaran jalan dan pemasangan *Rest Area Monitoring System* (RAMS).

- d) Preservasi Jalan Nasional dipercepat agar tidak mengganggu perjalanan mudik serta tidak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
- e) Perlu penambahan rambu-rambu petunjuk arah di jalan Tol dan jalan Nasional, serta ketersediaan petugas piket di ruas tol fungsional.
- f) Peningkatan koordinasi antara Ditjen Bina Marga, BPJT, Operator Jalan Tol dengan Kepolisian dan Ditjen Perhubungan Darat untuk pengaturan manajemen lalu lintas, khusus di ruas Tol fungsional.

4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)

- a) Rencana siaga SAR khusus Angkutan Lebaran dimulai tanggal 13 April sampai 3 Mei 2023 selama 21 hari. Siaga SAR diantaranya siaga jaga harian, siaga rescue, komunikasi dan jaringan, logistik, humas, alat sar dan juga koordinasi dengan beberapa instansi terkait.
- b) Kantor SAR Bandung akan melaksanakan kesiapsiagaan SAR selama 24 jam dan terbagi menjadi 2 shift dengan memonitoring dan memantau perjalanan baik moda darat, laut, udara, danau dan penyeberangan.
- c) Perlu disediakan tim siaga mobile pada obyek wisata di beberapa lokasi wisata di Jawa Barat.
- d) Perlu melaksanakan posko di tol yang memiliki potensi rawan kecelakaan lalu lintas, antara lain jalan Tol Jakarta-Cikampek KM. 57, Tol Cipali KM. 102 KM.166, posko terpadu Nagreg, dan Gentong Tasik.
- e) Menyediakan layanan *call center* untuk akses masyarakat dalam situasi penanganan khusus dan *emergency*.
- f) Perlu peningkatan *respons time* terhadap penanganan kecelakaan di ruas jalan Tol dan jalan Nasional, serta tempat wisata.

5. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

- a) Kondisi cuaca, iklim dan kegempaan selama periode mudik lebaran 2023 di Provinsi Jawa Barat akan diamati dan disampaikan oleh 6 Stasiun BMKG, diantaranya Stasiun Klimatologi Dramaga Bogor, Stasiun Meteorologi Citeko, Observatory Geofisika Pelabuhan Ratu, Stasiun Meteorologi Jatiwangi, Pos Observasi Geofisika Lembang, dan Stasiun Geofisika Bandung.

- b) Menurut data BMKG, pada saat mudik Lebaran 2023 prakiraan cuaca masih dalam musim hujan dan peralihan ke musim kemarau. Oleh karena itu, perlu informasi prakiraan cuaca dan cuaca ekstrem secara regular kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
- c) Terkait prakiraan cuaca, iklim dan kegempaan agar BMKG terus aktif dalam memantau dan memberikan informasi selama posko Angkutan Lebaran 2023.
- d) Akses informasi dapat melalui *website*, aplikasi mobile, media sosial, *contact center* 196, radio, televisi, dan media online/cetak untuk informasi secara keseluruhan potensi cuaca, iklim dan kegempaan, produk informasi tematik provinsi Jawa Barat seperti jalur mudik dan daerah wisata, perkiraan cuaca di masjid/tempat ibadah, dan kota besar daerah Jawa Barat.

II.2. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Terdapat beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dalam rangka Persiapan Arus Mudik Lebaran ke Provinsi Jawa Barat, sbb:

1. Komisi V DPR RI meminta Pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas seluruh stakeholder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga tahapan evaluasi operasi angkutan Lebaran tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kelancaran, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan agar meningkatkan pengawasan terhadap operator transportasi darat untuk memastikan kesiapan dan kelaik operasian armada dan turut bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terminal Leuwipanjang agar memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
3. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pengawasan terhadap operator transportasi Kereta Api, termasuk digitalisasi pelayanan di stasiun, optimalisasi angkutan barang melalui kereta api pada malam hari, *on time performance* dan kualitas pelayanan terhadap penumpang, serta kebersihan di wilayah stasiun.
4. Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga dan BPJT Kementerian PUPR untuk segera melakukan preservasi Jalan Nasional dan Jalan Tol yang rusak danantisipasi

jalur Tol fungsional menjelang arus mudik lebaran di Provinsi Jawa Barat, utamanya hambatan samping misalnya kendaraan parkir di pinggir jalan, pelayanan di gerbang tol yang cepat dengan memastikan semua fasilitas berfungsi baik, dan pemenuhan SPM Jalan Tol.

5. Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk memberikan informasi prakiraan cuaca dan cuaca ekstrim secara regular kepada masyarakat dengan cepat, tepat dan akurat, termasuk di tempat-tempat ibadah dan daerah wisata.
6. Komisi V DPR RI meminta BASARNAS untuk meningkatkan *quick respons time* dalam mengatasi masalah di darat, laut dan udara.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Barat pada Masa Persidangan IV Tahun 2022-2023 Tanggal 14-18 April 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan akan disampaikan dalam Rapat Komisi bersama Mitra Kerja untuk ditindaklanjuti.

KETUA TIM

Ttd

H. ANDI IWAN DARMAWAN ARAS, S.E., M.SI
A-103

IV. LAMPIRAN
Foto Kegiatan





